

LAPORAN RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2026 adalah suatu Dokumen Perencanaan yang bersifat sistematis, taktis dan strategis serta berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2026 merupakan rumusan pernyataan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi selama 1 tahun kedepan.

Kami berharap penyusunan Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan kegiatan di DPMPTSP, serta menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kinerja bagi para pegawai DPMPTSP didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kami mengakui dan menyadari bahwa Laporan Penyusunan Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pemikiran. Untuk itu diharapkan sumbang saran dan pendapat yang bersifat membangun demi sempurnanya Penyusunan Renja ini. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran hingga tersusunnya laporan Renstra DPMPTSP ini.

Kabupaten Bekasi, Juli 2025

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



IMAN NUGRAHA, ST, M.Si

NIP. 19760829 200311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 EVALIASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	7
2.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13
2.2.1 Penanaman Modal	15
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	17
2.3.1 Permasalahan	17
2.3.2 Isu Strategis	23
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	41
2.5 PENELAAHAN PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN MASYARAKAT	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	45
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	45
3.1.1 Nasional	45
3.1.2 Provinsi	45
3.1.3 Telaah Keterkaitan Kebijakan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten	46
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	46
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dengan DPMPTSP	2
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2025	12
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi	14
Tabel 2. 3 Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024	15
Tabel 2. 4 Realisasi Jumlah Proyek Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Sektor Usaha.....	16
Tabel 2. 5 Realisasi Investasi Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Negara	17
Tabel 2. 6 Perumusan Isu Strategis Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2026	40
Tabel 2. 7 Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Bekasi	42
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	48
Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.....	46
Tabel 3. 3 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 3. 4 Rancangan Awal DPMPTSP Kabupaten Bekasi.....	48
Tabel 3. 5 Rancangan Awal Program dan Kegiatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026.....	49
Tabel 4. 1 Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	2
Gambar 2. 1 Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024	16
Gambar 2. 2 Bagan Isu Green and Blue Ekonomi	25
Gambar 2. 3 Bagan Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	26

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Bab ini menjelaskan kedudukan Renja-PD sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran Renstra-PD serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, diuraikan landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja-PD, serta sistematika penulisan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Penyusunan Renja-PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Renja-PD sebagai instrumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Renja-PD berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) ke dalam rencana kerja tahunan yang terukur dan implementatif.

Sebagai dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja-PD memiliki kedudukan yang strategis karena berperan sebagai penghubung antara perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja-PD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Renstra Perangkat Daerah, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, serta RKPD. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa proses penyusunan Renja-PD dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap persiapan penyusunan Renja-PD, yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja-PD, orientasi penyusunan Renja-PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;
2. Tahap penyusunan rancangan Renja-PD; dan
3. Tahap penetapan Renja-PD.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja-PD, DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Renja DPMPTSP dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus pada pengkajian kondisi eksisting DPMPTSP, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Bagan Alur penyusunan Renja PD dapat dilihat pada Gambar berikut :

PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD



Gambar 1. 1 Bagan Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja DPMPTSP disusun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat program dan kegiatan di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Program dan kegiatan yang direncanakan disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP, serta diselaraskan dengan sasaran dan indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Dengan demikian, Renja DPMPTSP diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dan terarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta mampu mendorong peningkatan iklim investasi, kualitas pelayanan perizinan, dan kontribusi sektor penanaman modal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pemetaan Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran dan Indikator Sasaran DPMPTSP Kabupaten Bekasi dapat digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 1. 1 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dengan DPMPTSP

Tujuan daerah	Indikator tujuan daerah	Sasaran daerah	Indikator sasaran daerah	Sasaran perangkat daerah	Indikator sasaran perangkat daerah	Perangkat daerah
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah yang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	DPMPTSP

tangguh dan berkeadilan						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPSTP) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195);
15. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.2265-BKPSDM/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 212 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023–2026;
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan arah kebijakan serta pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi dokumen perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Bekasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian singkat tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, serta keterkaitan Renja-PD dengan RKPD, Renstra-PD, Renja K/L, Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, dan keterkaitannya dengan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, kedudukan, SOTK DPMPTSP, serta pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.3 Maksud dan Tujuan | Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2026. |
| 1.4 Sistematika Penulisan | Menguraikan pokok bahasan dan susunan garis besar isi dokumen Renja DPMPTSP. |

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- | | |
|--|---|
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD | Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (Tahun 2025) yang dikaitkan dengan target Renstra DPMPTSP. |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Analisis capaian kinerja pelayanan DPMPTSP berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | Uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, keterkaitan dengan SPM dan SDGs, serta tantangan dan peluang peningkatan pelayanan. |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | Uraian proses perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DPMPTSP, alasan pelaksanaan review, serta temuan dan catatan penting hasil review. |
| 2.5 Penelaahan Program Kegiatan dan Usulan Masyarakat | |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- | | |
|---|---|
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah | Telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. |
| 3.2 Program dan Kegiatan | Bagian ini memuat arah peran dan kontribusi DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta gambaran usulan program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja, isu strategis, dan kebijakan pembangunan daerah. |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Penjelasan faktor pertimbangan perumusan program dan kegiatan, rekapitulasi jumlah program dan kegiatan, sebaran lokasi, serta tabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan.

BAB V PENUTUP Kesimpulan dan penegasan komitmen DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) tahun sebelumnya serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yang dikaitkan dengan target Rencana Strategis DPMPTSP. Selain itu, disajikan analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD sebagai dasar perumusan program dan kegiatan pada tahun perencanaan berikutnya.

2.1 EVALIASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya, perlu dilakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) tahun lalu (tahun n-2) yaitu Tahun 2024, serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun n-1) yaitu Tahun 2025, dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 yang pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah telah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis DPMPTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan realisasi Renstra DPMPTSP disusun dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan DPMPTSP dan/atau realisasi APBD DPMPTSP yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini meliputi:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya, tercapainya, atau terlampauinya target kinerja program dan kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian target program dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP; dan
6. Kebijakan serta langkah perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut pada tahun perencanaan berikutnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan realisasi Renstra DPMPTSP tersebut mengacu pada laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD, yang selanjutnya disajikan dalam tabel evaluasi sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- **Penyelarasan Indikator Kinerja:** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang spesifik, terukur, dan selaras dengan target RPJMD dan RPJPD.
- **Peningkatan Pengawasan:** Memperkuat pengawasan internal terkait potensi benturan kepentingan, gratifikasi, serta memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- **Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor:** Mengadakan rapat koordinasi berkala dengan dinas teknis terkait (seperti Dinas PUPR atau Dinas Lingkungan Hidup) untuk mengatasi hambatan birokrasi dan lamanya waktu penerbitan izin.

Fokus pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Menjadikan IKM sebagai tolok ukur utama evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bersama ini juga dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penghargaan serta Inovasi yang pernah diperoleh selama kurun waktu Tahun 2025.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2025

KODE	URUSAN / ARAHAN / BAGIAN PENGHAYATAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) / BAGIAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) FY Tahun 2025- 2026	REALISASI TARGET KINERJA KUAL. PROGRAM DAN KEJARAN ASISTEN S.D TAHUN N-1 (2022)	TARGET PELAKSANA KINERJA PROGRAM DAN KEJARAN TAHUN SASU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEJARAN (KINERJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN N-1 (2024)	PENCAPAIAN KINERJA CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN BERIKUT	
					TARGET KINERJA FY TAHUN N-2 (2022)	REALISASI KINERJA FY TAHUN N-2 (2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI KINERJA DAN KEJARAN S.D TAHUN BERIKUT TAHUN N-1 (2023)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.11	PERENCANAAN									
3.11.21	PROGRAM PENGHAYATAN DAERAH PENGHAYATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi Perencanaan	100%	100%	100%	100%	94.20%	100%	25.95%	25.95%
		Perencanaan secara dan koordinasi aparat di dalam lingkup baik	100%	100%	100%	100%	94.20%	100%	25.95%	25.95%
		Tingkat ketercapaian hasil perencanaan terpilih secara dan koordinasi	100%	100%	100%	100%	94.20%	100%	25.95%	25.95%
3.11.21.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseminya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	94.20%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
3.11.21.2.1.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terseminya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85.00%	1 Dokumen	-	-
3.11.21.2.1.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Isi dan Isi Dokumen RKA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	89.17%	1 Dokumen	-	-
3.11.21.2.1.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SPD	Isi dan Isi Dokumen Perencanaan RKA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan RKA- SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.33%	1 Dokumen	-	-
3.11.21.2.1.04	Penyusunan dan Penyusunan RPA- SKPD	Isi dan Isi Dokumen RPA, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.17%	1 Dokumen	-	-
3.11.21.2.1.05	Kordinasi dan Penyusunan Perencanaan RPA-SKPD	Isi dan Isi Dokumen Perencanaan RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan RPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.33%	1 Dokumen	-	-

LAPORAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PERENCANAAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/ HASILATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRUKTURISASI) TAHUN 2023- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HARI PROGRAM DAN KELOMPOK KELOMPOK TAHUN 2023 (2023)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELOMPOK TAHUN LALO (2023)			TARGET PROGRAM DAN KELOMPOK PERINGKAT DAERAH TAHUN 2024 (2024)	PRAKTIK REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA PERENCANAAN DAERAH S/D TAHUN BERIKUTNYA	
					TARGET KINERJA PROGRAM 2023 (2023)	REALISASI KINERJA PD TAHUN 2023 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		KUALITAS CAPAIAN PROGRAM DAN KELOMPOK S/D TAHUN BERIKUTNYA TAHUN 2024 (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01.1.01.00	Strukturisasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Sasaran Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Sasaran Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Sasaran Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	68,87%	2 laporan	2 laporan	100%
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Ketersediaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	99,35%	100%	100%	100%
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	99,26%	72 orang	72 orang	100%
2.18.01.1.02.05	Kendali dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	97,54%	1 orang	-	-
2.18.01.1.02.07	Kendali dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SKPD) dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SKPD)	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	87,25%	29 orang	-	-
2.18.01.1.04	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Dokumen Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	99,95%	100%	100%	100%
2.18.01.1.05.01	Pengelolaan Paket Dinas Besar atau Kompleksitas	Jumlah Paket Pelayanan Dinas Besar atau Kompleksitas	72 paket	72 paket	72 paket	72 paket	99,65%	-	-	-
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Pemerintah Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	100%	62 orang	62 orang	100%

LAPORAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

KODE	INDIKATOR/ HASIL KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH (AKSI PROGRAM/ KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS)/ KEGIATAN (INPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (KINERJA PI) TAHUN 2022-2024	RENCANA TARGET KINERJA KEBERHASILAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN N-1 (2023)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENCANA PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN N-1 (2024)	PENGUKURAN REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN N-1 (2023)	
					TARGET KINERJA PI TAHUN N-2 (2022)	REALISASI KINERJA PI TAHUN N-2 (2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN N-1 (2023)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI TARGET KINERJA (%)
E.18.01.1.36	Aksesibilitas Dimas Perangkat Daerah	Tersedianya Aksesibilitas Dimas Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	83,34%	100%	100%	100%
E.18.01.2.06.02	Pengelolaan dan Perawatan dan Perbaikan Jalan	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Jalan Yang Dikerjakan	30 paket	30 paket	34 paket	34 paket	96,15%	30 paket	30 paket	95,00%
E.18.01.2.06.04	Pengelolaan Jalan Logistik Kantor	Jumlah Paket Jalan Logistik Kantor Yang Dikerjakan	30 paket	25 paket	9 paket	9 paket	67,52%	3 paket	-	-
E.18.01.2.06.05	Pengelolaan Barung Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barung Cetak dan Penggantian Yang Dikerjakan	30 paket	30 paket	19 paket	19 paket	97,22%	19 paket	9 paket	95,67%
E.18.01.2.06.06	Penyediaan Koneksi Teras	Jumlah Paket Penyediaan Koneksi Teras	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	50,00%	4 paket	-	-
E.18.01.2.06.09	Pengembangan Ruang Koneksi dan Koneksi (RKP)	Jumlah Paket Pengembangan Ruang Koneksi dan Koneksi (RKP)	72 paket	72 paket	20 paket	20 paket	50,00%	72 paket	10 paket	22,22%
E.18.01.2.06.10	Pengembangan Ruang Koneksi dan Koneksi (RKP)	Jumlah Paket Pengembangan Ruang Koneksi dan Koneksi (RKP)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	95,00%	1 paket	-	-
E.18.01.2.07	Pengadaan Barung Nirkabel Daerah Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	Jumlah Barung Nirkabel Daerah Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	95,00%	4 unit	4 unit	100%
E.18.01.2.07.10	Pengadaan Barung Nirkabel Daerah Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barung Nirkabel Daerah Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	95,00%	2 unit	-	-
E.18.01.2.07.11	Pengadaan Barung Nirkabel Daerah Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barung Nirkabel Daerah Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	95,00%	2 unit	1 unit	25,00%
E.18.01.2.08	Pengelolaan Jasa Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Jasa Pemukiman Dimas Perangkat Daerah	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	94,00%	14 paket	14 paket	22,22%

LAPORAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/ KEGIATAN/ OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRUKTURISASI) TAHUN 2023- 2024	REALISASI TANGGAP KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN N-1 (2023)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LAIN (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RESTRUKTURISASI) TAHUN N-1 (2024)	PENCAPAIAN REALISASI CAPAIAN TANGGAP KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERGULAN TAHUN N-1 (2023)	
					TARGET KINERJA PD TAHUN N-1 (2023)	REALISASI KINERJA PD TAHUN N-1 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERGULAN TAHUN N-1 (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2.18.01.1.06.02	Pengelolaan Jasa Komodifikasi, Sumbat Duga Air dan Lintir	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komodifikasi, Sumbat Duga Air dan Lintir Yang Diterbitkan	12 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	33.33%	12 laporan	4 laporan	33.33%
2.18.01.1.06.04	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Diterbitkan	54 laporan	54 laporan	5 laporan	5 laporan	9.26%	54 laporan	14 laporan	25.93%
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Citra dan Pemasaran Barang	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	30 Unit	30 Unit	125 Unit	125 Unit	416.67%	30 Unit	10 Unit	33.33%
2.18.01.1.09.01	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Suplai Pemeliharaan, Perek dan Pemasangan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya Yang Diperbaiki dan Diperbaiki Perek dan Pemasangan	10 Unit	10 Unit	14 unit	14 unit	140.00%	10 unit	4 unit	40.00%
2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain Yang Diperbaiki/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	133 unit	133 unit	665.00%	20 unit	-	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Utama Penanaman Modal Daerah, Peta Pemerataan Investasi dan Peta Ruang Usaha Yang Dikeluarkan Dalam Menganalisis Iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Peraturan Pengaturan Iklim Investasi	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
2.18.02.2.01	Peningkatan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal Yang Mendukung Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Regulasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-
2.18.02.2.01.01	Peningkatan Fasilitas/Insentif Bidang Meningkatkan Fasilitas Fasilitas/Insentif dan Mendukung Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas/Insentif/Promosi Dalam Peningkatan Fasilitas/Insentif dan Mendukung Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-

LAPORAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/REK/ AKSIATAN/ OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (BUNTERA PPS TAHUN 2025- 2026)	STANDAR TARGET KINERJA BAKTI, PROGRAM DAN KELOMPOK KEGIATAN S.D TAHUN N-3 (2022)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELOMPOK TAHUN LAIN (2023)			TARGET PROGRAM DAN KELOMPOK KEGIATAN (BERIKUT PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1 (2024)	PENCAPAIAN REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN BERIKUTNYA	
					TARGET BERIKUT TAHUN N-2 (2022)	REALISASI BERIKUT TAHUN N-2 (2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KELOMPOK S.D TAHUN BERIKUTNYA TAHUN N-1 (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA (%)
2.10.02.2.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Pemetaan Dokumen Regulasi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	99,69%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.10.02.2.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	99,69%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.10.02.2.03	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-
2.10.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor Yang Mendapatkan Informasi Promosi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
2.10.03.2.01	Pengembangan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pelaksanaan Promosi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
2.10.03.2.02	Pengembangan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Kecil/Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
2.10.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terlayani Pelayanan dan Non Pelayanan Penanaman Modal	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	99,27%	1400 pelaku usaha	-	-
2.10.04.2.01	Pelayanan Pelayanan dan Non Pelayanan Secara Terpadu Satu Peta Hiliris Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelayanan Pelayanan dan Non Pelayanan Yang Terintegrasi	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	99,27%	1400 pelaku usaha	-	-
2.10.04.2.02	Penyediaan Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Non Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Non Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	1400 pelaku usaha	99,27%	1400 pelaku usaha	-	-

LAPORAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG / SUBURUSAN / BIDANG / SUBBIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR NILAI RASA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (KIPMKT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTA P0) TAHUN 2023-2024	REALISASI TARGET KINERJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1/1 TAHUN N-1 (2023)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTA PERINGKAT DAERAH TAHUN N-1 (2024)	PENCAPAIAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENCANA PERINGKAT DAERAH 1/1 TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENCANA P0 TAHUN N-2 (2021)	REALISASI RENCANA P0 TAHUN N-2 (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1/1 TAHUN BERJALAN TAHUN N-1 (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
2.18.01	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM Yang Direview	100%	100%	100%	100%	95.53%	100%	4.24%	4.24%
2.18.01.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menggaji Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyusunan Review LKPM	100%	100%	100%	100%	95.53%	100%	4.24%	4.24%
2.18.01.2.01.01	Koordinasi dan Sinergisitas Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinergisitas Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	98.02%	40 Kegiatan Usaha	-	-
2.18.01.2.01.02	Kepraktisan dan Sinergisitas Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	90.71%	100 Pelaku Usaha	-	-
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Sinergisitas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinergisitas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	84.20%	40 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	17.50%
2.18.02	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Dilatih, Dilaji, dan Dimasukkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	97.99%	1 dokumen	1 dokumen	17.23%
2.18.02.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Dilatih, Dilaji, dan Dimasukkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	97.99%	1 dokumen	1 dokumen	17.23%
2.18.02.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik Sajian, Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Yang Digunakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	97.99%	1 dokumen	1 dokumen	17.23%

2.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang mencerminkan pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi perangkat daerah. Indikator ini digunakan sebagai dasar utama dalam menilai capaian kinerja DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Sebagai bagian dari penilaian kinerja, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari indikator-indikator strategis dan paling merepresentasikan kinerja organisasi. Capaian IKU diharapkan mampu memberikan gambaran yang proporsional mengenai tingkat keberhasilan DPMPTSP dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP menggambarkan outcome dari program-program utama yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bekasi. Indikator tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha, Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP senantiasa dilakukan peninjauan dan penyempurnaan agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja organisasi diharapkan dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Bekasi. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target, Norma, Standar Prosedur, Kinerja (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke - (Persen)					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	NILAI KINERJA PELAYANAN PUBLIK					73.91	83.99	80,32	81,92		80.57		81,80	83,87		106.5		101,84	102,38	IKU
2	NILAI REALISASI PENANAMAN MODAL							44,12	45				41,9	54,13				94,97	120,29	IKU
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)		Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai Tujuan Investasi			39.66	41.65				43.26					109.1				
	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perijinan		Terwujudnya Pelayanan prima dalam meningkatkan iklim investasi																	
4	Nilai Investasi berdasarkan sektor		Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai Tujuan Investasi		37.77					37.32					98.81					
	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik		Terwujudnya Pelayanan prima dalam meningkatkan iklim investasi		90					90					100					

Berikut ini disampaikan data perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dilihat dari PMA, PMDN, Penyerapan Tenaga Kerja dan capaian Realisasi Investasi, untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah ini.

2.2.1 Penanaman Modal

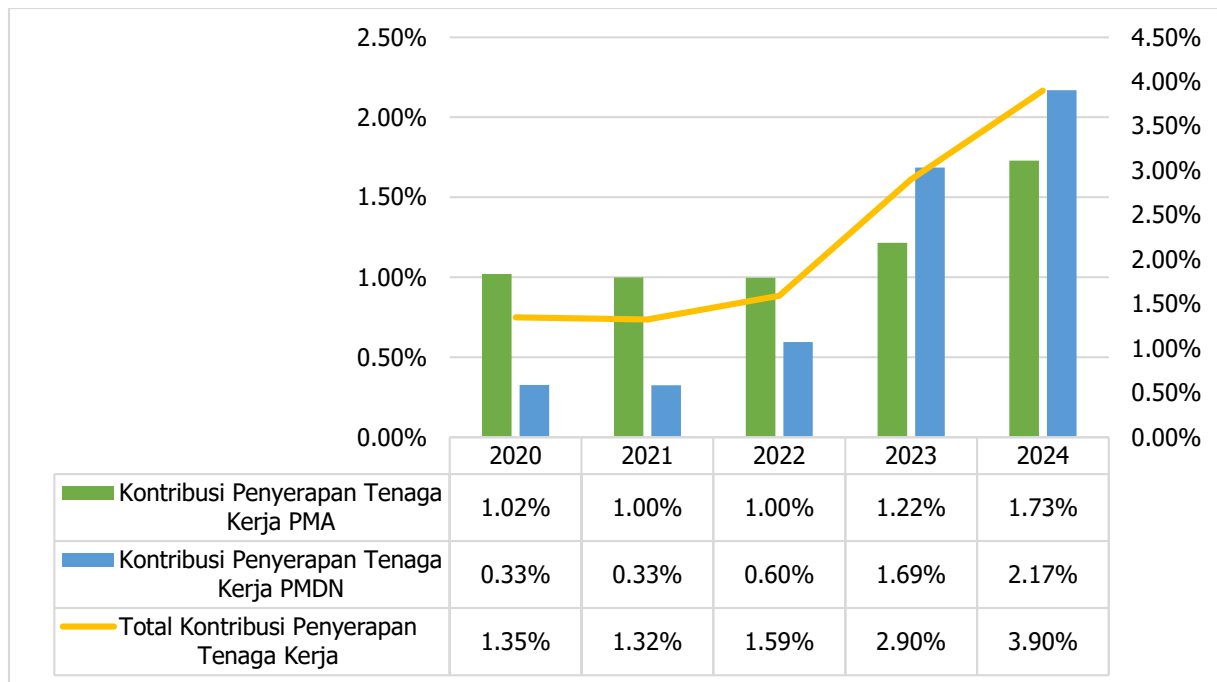
Penyerapan tenaga kerja akibat adanya investasi ini justru mengalami kenaikan dari 19.367 orang di tahun 2023 menjadi 28.011 orang di tahun 2024. Selanjutnya pada PDMN, penyerapan terhadap tenaga kerja juga ikut meningkat yang dimana pada tahun 2023 jumlah penyerapan tenaga kerja PMDN berjumlah 26.850 orang dan pada tahun 2024 menjadi 35.137 orang. Berkaitan dengan hal itu menunjukkan bahwa baik nilai PMDN maupun PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	18.790	19.492	20.002	19.367	28.011
2	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	6.018	6.354	11.942	26.850	35.137
3	Angkatan Kerja (Orang)	1.840.666	1.953.408	2.006.507	1.592.879	1.619.896

Sumber: <https://dpmpptsp.jabarprov.go.id/realisasiinvestasi/> dan BPS Kabupaten Bekasi, diolah

Selama tahun 2020-2024, total kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah dengan rentang di antara 1-3%. Meski rendah, kontribusi PMA maupun PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja meningkat positif dengan penyerapan tenaga kerja oleh PMA bertambah dari 1,02% pada tahun 2020 menjadi 1,73% di tahun 2024, dan untuk PMDN dari 0,33% pada tahun 2020 menjadi 2,17% di tahun 2024. Dari hasil keseluruhan tersebut didapatkan bahwa total kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana pada tahun 2020 sebesar 1,35% menjadi 3,90% di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 1 Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi Periode Januari – Maret 2025. Total realisasi investasi, jumlah proyek dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Maret 2025, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4 Realisasi Jumlah Proyek Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	Jumlah Proyek	Ratio (%)
1	Perdagangan dan Reparasi	3,583	33,46
2	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	1,161	10,84
3	Konstruksi	1,122	10,48
4	Jasa Lainnya	813	7,59
5	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	621	5,8

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2025

Realisasi peringkat negara menurut PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Maret 2025 berdasarkan negara. Negara dengan investasi paling besar pada periode Januari – Maret 2025 yaitu negara Indonesia dengan total investasi sebesar (33,77%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 5 Realisasi Investasi Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Negara

No	Negara	Ratio (%)
1	Indonesia	33,66
2	Jepang	27,01
3	Singapura	12,77
4	Amerika Serikat	6,98
5	Korea Selatan	5,23

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2025

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan kebijakan. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai satu kesatuan sistem operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bekasi. Strategi yang dirumuskan ditentukan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta mendukung peningkatan iklim investasi daerah. Adapun strategi DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi serta hasil beberapa kajian dan masukan dari seluruh stakeholder, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Investasi

Kabupaten Bekasi, dengan lokasinya yang strategis dan potensi ekonomi yang besar, seharusnya dapat menjadi magnet bagi investasi baik domestik maupun asing. Namun, kenyataannya, peningkatan nilai investasi di wilayah ini masih belum optimal. Hal ini menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Bekasi. Dalam konteks ini, berbagai faktor penghambat perlu dianalisis secara mendalam dan diatasi dengan kebijakan yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah ketidaksempurnaan infrastruktur. Meskipun Kabupaten Bekasi terletak di kawasan industri yang berkembang pesat, terutama di wilayah industri besar seperti Cikarang, infrastruktur transportasi, logistik, dan konektivitas digital masih belum memadai. Hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan distribusi barang yang tidak efisien, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Selain itu, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala besar. Tanpa adanya tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai, perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bekasi akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasional mereka secara optimal.

Selain itu, proses perizinan yang lambat dan birokrasi yang rumit masih menjadi salah satu hambatan utama bagi calon investor. Meskipun DPMPTSP telah berusaha untuk menyederhanakan proses tersebut, namun masih ada kekurangan dalam hal transparansi, keterpaduan antar lembaga, dan kejelasan prosedur. Hal ini membuat investor merasa ragu dan cenderung beralih ke daerah lain yang menawarkan proses perizinan yang lebih cepat dan efisien. Regulasi yang tidak mendukung dan sering berubah-ubah juga menambah ketidakpastian bagi dunia usaha, sehingga membuat calon investor enggan berkomitmen jangka panjang di Kabupaten Bekasi. DPMPTSP Kabupaten Bekasi memiliki peran penting dalam mempercepat pemecahan masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi, yaitu mempercepat proses perizinan, menyederhanakan prosedur yang ada, dan meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur—terutama yang berkaitan dengan transportasi, fasilitas umum, dan konektivitas digital—merupakan langkah penting yang harus dikejar agar Kabupaten Bekasi lebih terhubung dengan pasar global dan dalam negeri. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih fokus pada kebutuhan industri di wilayah Bekasi harus segera dijalankan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.

Sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investor, DPMPTSP juga harus mengoptimalkan promosi potensi daerah, baik melalui event internasional, digitalisasi informasi, maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat mengatasi berbagai kendala yang ada, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dan akhirnya meningkatkan nilai investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

a. Belum lengkapnya data dari 11 Industri Kawasan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)

Salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendorong peningkatan investasi adalah melalui penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO), yaitu dokumen proyek-proyek investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada calon investor, baik dalam maupun luar negeri. Namun, hingga saat ini, data dan informasi dari 11 kawasan industri yang menjadi bagian dari IPRO Kabupaten Bekasi belum terkumpul secara lengkap dan sistematis.

Kondisi ini menjadi kendala serius dalam menyusun bahan promosi investasi yang komprehensif dan kredibel. Minimnya kelengkapan data teknis seperti legalitas lahan, status perizinan, kesiapan infrastruktur, estimasi kebutuhan investasi, potensi pasar, serta analisis risiko menyebabkan calon investor kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal ini juga berdampak pada rendahnya daya saing Kabupaten Bekasi dalam forum promosi investasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selain itu, keterbatasan data yang tersedia menghambat optimalisasi fungsi platform digital seperti *Investment Information System*, dan mengurangi efektivitas penyusunan peta tematik investasi berbasis spasial (GIS). Koordinasi dan kolaborasi antara DPMPTSP dengan pengelola kawasan industri dan OPD teknis lainnya juga masih perlu ditingkatkan untuk mendorong pelaporan data yang akurat dan tepat waktu.

Sebagai solusi, perlu dilakukan langkah strategis berupa penguatan mekanisme pendataan melalui surat edaran Bupati, pendampingan teknis bagi pengelola kawasan industri, dan pembentukan *Helpdesk Investasi* yang bertugas mengakselerasi pengumpulan dan verifikasi data IPRO. Dengan data yang lengkap dan valid, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mampu menyusun profil investasi yang berkualitas dan menarik bagi investor, sejalan dengan visi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis.

2. Pelayanan Publik Belum Optimal

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga saat ini, pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi dinilai masih belum optimal, baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kemudahan akses, maupun kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

Permasalahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain masih terbatasnya integrasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS-RBA) dengan layanan di tingkat daerah, kapasitas dan kompetensi SDM pelayanan yang belum merata, serta infrastruktur pendukung layanan yang belum memadai di seluruh unit kerja. Selain itu, proses pelayanan yang masih bersifat sektoral dan kurang sinergis dengan OPD teknis lainnya menyebabkan terjadinya hambatan birokrasi dan ketidaksesuaian waktu layanan dengan ekspektasi pemohon.

Dampak dari pelayanan publik yang belum optimal ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pelayanan pemerintah daerah, munculnya keluhan dan potensi administrasi, serta lambatnya proses investasi yang seharusnya dapat dikawal lebih cepat dan tepat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya strategis yang meliputi penguatan kapasitas SDM pelayanan, percepatan digitalisasi perizinan, pembenahan standar pelayanan publik (SPP), serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan pengguna layanan. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi lintas OPD dan percepatan integrasi layanan daerah dengan sistem nasional, agar tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

a. Transformasi digitalisasi pelayanan publik yang belum optimal

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Di era industri 4.0 dan masyarakat digital, tuntutan terhadap layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi semakin tinggi. Namun demikian, proses digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi masih belum berjalan secara optimal.

Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya integrasi antara sistem pelayanan perizinan daerah dengan platform nasional seperti OSS-RBA, belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi di seluruh lini layanan, serta kurangnya pemahaman teknis SDM terhadap pengelolaan sistem digital. Selain itu, infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, server, dan perangkat pendukung lainnya, masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan yang andal dan berkelanjutan.

Transformasi digital yang belum optimal juga berdampak pada rendahnya kualitas layanan, lamanya waktu penyelesaian izin, serta tingginya potensi kesalahan input atau duplikasi data. Hal ini bukan hanya menghambat efektivitas pelayanan, tetapi juga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dan investor, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target investasi daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti percepatan integrasi sistem pelayanan berbasis elektronik dengan OSS dan sistem internal, peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. DPMPTSP Kabupaten Bekasi juga perlu melakukan transformasi budaya kerja berbasis data dan teknologi, disertai dengan monitoring layanan digital secara berkala agar proses pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan terpercaya.

b. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bekasi merupakan pusat integrasi layanan dari berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Keberadaan MPP menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima yang berbasis kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, implementasi dan pengelolaan MPP di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum lengkapnya jenis layanan dan instansi yang bergabung di dalam MPP, terbatasnya jam operasional yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia frontliner yang memiliki kompetensi pelayanan terpadu, serta masih minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem antrian, pelacakan layanan, dan umpan balik pelanggan secara real-time.

Selain itu, sosialisasi keberadaan dan fungsi MPP kepada masyarakat juga dinilai masih belum masif, sehingga tingkat kunjungan dan partisipasi publik belum mencapai target yang diharapkan. Akibatnya, potensi MPP sebagai pusat pelayanan satu pintu yang terintegrasi belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik di Kabupaten Bekasi.

Dampak dari kondisi ini adalah terhambatnya percepatan reformasi birokrasi pelayanan, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah, serta belum terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan lintas instansi. Hal ini juga berdampak pada persepsi investor terhadap kemudahan berusaha di daerah.

Sebagai langkah strategis, DPMPTSP Kabupaten Bekasi perlu memperkuat kelembagaan MPP dengan memperluas layanan lintas instansi, memperbaiki manajemen SDM pelayanan, mengembangkan fitur digital pendukung layanan, serta meningkatkan komunikasi publik terkait manfaat MPP. Dengan optimalisasi MPP, Kabupaten Bekasi dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha.

3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Bidang Penanaman Modal

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai merupakan kunci utama dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang prima, serta promosi penanaman modal yang efektif dan berdaya saing. Namun demikian, hingga saat ini, kualitas dan kuantitas SDM pada bidang penanaman modal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bekasi masih belum optimal.

Secara kualitas, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman regulasi terbaru terkait investasi, penggunaan sistem layanan digital seperti OSS-RBA, serta kemampuan teknis dalam menyusun profil investasi yang layak tawar (*bankable*). Di sisi lain, secara kuantitas, jumlah personel yang menangani urusan penanaman modal masih belum sebanding dengan kompleksitas dan volume pekerjaan, terutama dalam pelayanan investor, pengawasan realisasi investasi, penyusunan data IPRO, serta fasilitasi proyek strategis daerah.

Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya layanan konsultasi dan fasilitasi kepada investor, keterlambatan dalam pembaruan data penanaman modal, serta rendahnya kualitas promosi investasi yang berbasis sektor unggulan daerah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian hambatan investasi juga menjadi tidak efektif karena keterbatasan SDM pengampu yang dapat menjadi penghubung (*liaison officer*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan dari instansi terkait seperti BKPM. Di sisi lain, perlu dilakukan evaluasi dan penataan organisasi guna menyesuaikan kebutuhan personel dengan beban kerja dan tuntutan reformasi pelayanan publik. Dengan penguatan SDM bidang penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Bekasi akan mampu menjalankan fungsi promosi, pelayanan, dan pengawasan investasi secara lebih optimal dan profesional.

a. Kurangnya promosi penanaman modal

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi adalah kurangnya promosi penanaman modal yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan daerah. Meskipun Kabupaten Bekasi memiliki posisi geografis yang strategis dan merupakan pusat industri nasional, namun upaya promosi dan pemasaran potensi investasi daerah belum dilakukan secara optimal.

Minimnya publikasi mengenai peluang investasi, kurangnya penyediaan informasi yang terintegrasi dan terkini mengenai potensi sektor unggulan, serta belum

maksimalnya pemanfaatan media digital dan forum investasi menjadi penghambat utama dalam menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, belum terbangunnya branding daerah sebagai kawasan yang ramah investasi membuat daya saing investasi Kabupaten Bekasi tertinggal dibandingkan daerah lain di sekitar Jabodetabek.

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang promosi dan pemasaran investasi, serta belum adanya kerja sama yang aktif dan strategis dengan Kementerian Investasi/BKPM, pelaku usaha, dan mitra internasional. Akibatnya, realisasi investasi yang masuk belum mencerminkan potensi optimal yang dimiliki daerah, serta tidak merata di seluruh wilayah kecamatan.

Untuk itu, diperlukan intervensi strategis berupa peningkatan kapasitas kelembagaan promosi investasi, penguatan data dan informasi peluang usaha, serta inovasi media promosi berbasis digital dan kolaboratif, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

b. Kurangnya SDM Pengendalian Penanaman Modal

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam bidang pengendalian penanaman modal. Fungsi pengendalian merupakan bagian penting dari siklus investasi, yang mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, serta verifikasi terhadap pelaksanaan realisasi investasi oleh para pelaku usaha.

Namun demikian, saat ini jumlah dan kompetensi SDM yang tersedia belum sebanding dengan luas cakupan wilayah dan tingginya volume kegiatan investasi di Kabupaten Bekasi. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha tidak berjalan optimal, yang berdampak pada minimnya data valid terkait tingkat kepatuhan investor terhadap komitmen perizinan, pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), dan pemenuhan aspek legalitas lainnya.

Kurangnya SDM yang memiliki keahlian teknis di bidang pengendalian penanaman modal juga menyebabkan rendahnya efektivitas pembinaan terhadap perusahaan, serta belum maksimalnya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian investasi dengan rencana tata ruang dan ketentuan perizinan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keterbatasan ini semakin kompleks dengan belum tersedianya sistem pendukung yang memadai, seperti database pengendalian yang terintegrasi dan dashboard pengawasan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengendalian penanaman modal menjadi sangat mendesak, agar fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap investasi dapat berjalan secara sistematis, akurat, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

4. Belum sempurnanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

Permasalahan penting yang masih dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi adalah belum sempurnanya regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Ketidadaan atau belum lengkapnya landasan hukum yang kuat dan adaptif terhadap dinamika regulasi nasional, khususnya dalam kerangka reformasi pelayanan publik dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), menghambat optimalisasi peran DPMPTSP dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Hingga saat ini, beberapa substansi pengaturan dalam Perda masih bersifat parsial, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, dan belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan lintas sektor yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan belum terdefinisinya dengan jelas mekanisme koordinasi antara DPMPTSP dengan perangkat daerah teknis, khususnya dalam pengawasan, penerbitan rekomendasi teknis, dan tindak lanjut pengaduan.

Kondisi ini berdampak pada ketidakkonsistenan prosedur pelayanan, kelemahan dalam penegakan kepatuhan perizinan, serta rendahnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, tidak adanya kepastian hukum yang jelas juga menyulitkan DPMPTSP dalam mengembangkan inovasi pelayanan perizinan digital dan non-perizinan berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara komprehensif, adaptif terhadap sistem OSS-RBA, serta responsif terhadap kebutuhan investasi daerah dan pelayanan publik, menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi.

2.3.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dibawah ini merupakan beberapa isu strategis yang secara garis besar berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1. Isu Global

Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah tidak terkecuali Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Langkah awal pembangunan jangka menengah 2025-2029 harus mampu menjadi landasan / fondasi bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang sudah mengantisipasi konteks tantangan global tersebut khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dibawah ini merupakan isu global yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- **Geopolitik dan geoekonomi.** Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.
- **Distrupsi teknologi.** Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.
- **Perdagangan internasional.** Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

2. Isu Nasional

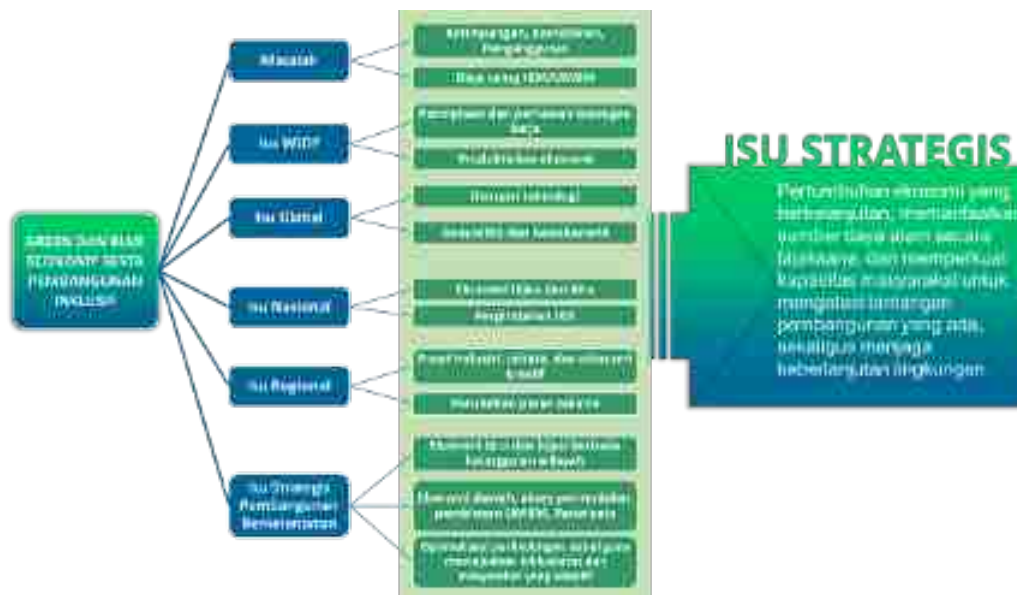
- **Ekonomi hijau dan ekonomi biru.** Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

- **Desentralisasi dan otonomi daerah.** Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3. Isu Provinsi Jawa Barat

- **Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma green dan blue economy yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.



Gambar 2. 2 Bagan Isu Green and Blue Ekonomi

Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. *Blue economy*, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep

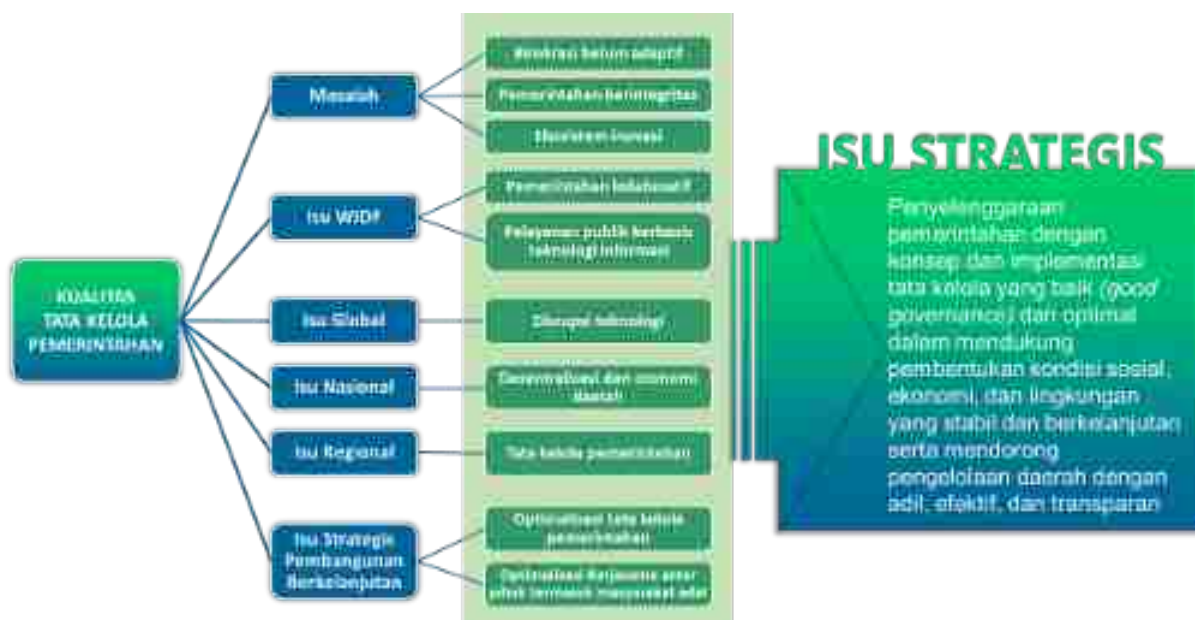
ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. Blue economy menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green dan blue economy* dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

➔ Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.



Gambar 2. 3 Bagan Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

c. Keadilan dan Keterbukaan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

d. Efisiensi dan Efektivitas

Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

e. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

f. Inovasi dan Teknologi

Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

g. Kolaborasi dan Kemitraan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

4. Isu KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Dibawah ini merupakan isu strategis dari KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- 2) Perlunya peningkatan ketahanan energi, air, dan pangan
- 3) Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan
- 4) Perlunya percepatan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan DDDTLH
- 5) Perlunya upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang berkebudayaan secara inklusif dan merata
- 6) Perlunya pengendalian Perubahan guna lahan, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dari keenam isu tersebut, yang berhubungan dengan Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bekasi yaitu isu Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan

5. Isu Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Didalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis antara lain :

- 1) Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing, Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah
- 2) Pembangunan Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan Berbasis Tata Ruang Serta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hudup
- 3) Pemenuhan Pelayanan Dasar, Dan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, Dan Berkeadilan
- 4) Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berbudaya Maju Dan Berdaya Saing
- 5) Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif

Dari penjabaran masing-masing isu strategis diatas kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bekasi, yang jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 6 Perumusan Isu Strategis Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2026

Potensi Daerah	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Isu Strategis Renja DPMPTSP
			Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten Bekasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Memiliki Kawasan Industri Terluas Se-Asia Tenggara	1. Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Investasi 2. Pelayanan Publik Belum Optimal 3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Bidang Penanaman Modal 4. Belum sempurnanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan	1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Distrupsi teknologi 3. Perdagangan Internasional	1. Ekonomi hijau dan ekonomi biru 2. Desentralisasi dan otonomi daerah	1. Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif 2. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif	1. Belum optimalnya cakupan layanan Penanaman Modal dan Perizinan karena keterbatasan sarana dan prasarana perizinan 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan dan kurangnya sosialisasi yang terkait perizinan dan non perizinan 3. Belum optimalnya inventarisasi, pendataan dan sosialisasi terkait dengan project investasi yang siap pakai sehingga dapat menjaga iklim investasi 4. Belum didukungnya oleh SDM yang profesional secara kualitas dan kuantitas 5. Kurangnya kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam invetasi,

Potensi Daerah	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Isu Strategis Renja DPMPTSP
			Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten Bekasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
							perdagangan dan kegiatan ekonomi 6. Perlunya pengembangan sistem digital keamanan cyber dan integrasi teknologi Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM yang profesional

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Review dilakukan untuk menilai kesesuaian antara program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Melalui review ini, dilakukan pemetaan kebutuhan, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan anggaran yang diperlukan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal. Hasil review diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan perencanaan agar program dan kegiatan DPMPTSP lebih terarah, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 2.7 Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAIAN MODAL				2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAIAN MODAL			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	75,81	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	75,81
2	18	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	2	18	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-
2	18	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2	18	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2	18	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS KPD	0 Dokumen	2	18	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS KPD	0 Dokumen

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	201	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-KPD	0 Dokumen	2	18	01	201	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-KPD	0 Dokumen
2	18	01	201	004	Koordinasi dan Penyusunan DPAS-KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAS-KPD	0 Dokumen	2	18	01	201	004	Koordinasi dan Penyusunan DPAS-KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAS-KPD	0 Dokumen
2	18	01	201	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAS-KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPAS-KPD	1 Dokumen	2	18	01	201	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAS-KPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPAS-KPD	1 Dokumen
2	18	01	201	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2	18	01	201	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2	18	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
2	18	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2	18	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-
2	18	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	2	18	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan
2	18	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2	18	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan
2	18	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2	18	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	2	18	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-
2	18	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	2	18	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket
2	18	01	205	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2	18	01	205	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
2	18	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	103 Orang	2	18	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	103 Orang
2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-
2	18	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2	18	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket
2	18	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2	18	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	2	18	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket
2	18	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	2	18	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket
2	18	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2	18	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
2	18	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	2	18	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan
2	18	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	2	18	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan
2	18	01	206	0010	Penelaahan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Dokumen Penelaahan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2	18	01	206	0010	Penelaahan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Jumlah Dokumen Penelaahan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah		-	-	2	18	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah		-	-
2	18	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2	18	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
2	18	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2	18	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
2	18	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah		-	-	2	18	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah		-	-
2	18	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2	18	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2	18	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54 Laporan	2	18	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54 Laporan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	20	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	2	18	01	20	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah		-	-
2	18	01	20	9	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznanya	10 Unit	2	18	01	20	9	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznanya	10 Unit
2	18	01	20	9	0009 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	2	18	01	20	9	0009 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit
2	18	01	20	9	0010 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	2	18	01	20	9	0010 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit
2	18	01	20	9	0011 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	20 Unit	2	18	01	20	9	0011 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	20 Unit

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KUMPENANAMAN MODAL		Realisasi Total terhadap target Investasi	1%	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KUMPENANAMAN MODAL		Realisasi Total terhadap target Investasi	1%
2	18	02	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diodang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		-	-	2	18	02	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diodang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		-	-
2	18	02	201	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2	18	02	201	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
2	18	02	201	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMAPMDN) dengan UMK/MDI daerah	1 Dokumen	2	18	02	201	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMAPMDN) dengan UMK/MDI daerah	1 Dokumen
2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota		-	-	2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota		-	-

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	02	202	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen	2	18	02	202	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen
2	18	02	202	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	2	18	02	202	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah
2	18	02	202	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	1 Dokumen	2	18	02	202	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	1 Dokumen
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	9,00%	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	9,00%
2	18	03	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten Kota		-	-	2	18	03	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten Kota		-	-
2	18	03	201	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	1 Dokumen	2	18	03	201	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	1 Dokumen

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	03	201	003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	2	18	03	201	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%
2	18	04	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	2	18	04	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-
2	18	04	201	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2	18	04	201	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	04	201	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	2	18	04	201	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha
2	18	04	201	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusahaberbasis risiko	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	2	18	04	201	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusahaberbasis risiko	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	04	201	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	400 Kegiatan Usaha	2	18	04	201	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	400 Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%
2	18	05	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	2	18	05	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-
2	18	05	201	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahnya	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahnya	40 Kegiatan Usaha	2	18	05	201	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahnya	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahnya	40 Kegiatan Usaha

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	05	201	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	2	18	05	201	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha
2	18	05	201	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2	18	05	201	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	88%	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	88%
2	18	06	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-	-	2	18	06	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-	-

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	06	201	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	2	18	06	201	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen

Sumber: DPMPTSP, 2025

2.5 PENELAAHAN PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya dianalisis dan diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, prioritas pembangunan daerah, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran didasarkan pada hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Selanjutnya, bab ini juga memuat rumusan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu strategis yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, Bab III diharapkan dapat menjadi landasan operasional dalam mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang efektif, efisien, dan berdaya saing, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bekasi.

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1 Nasional

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan serta capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dengan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kewenangannya di tingkat pusat, serta Renstra perangkat daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting daerah. Sinkronisasi ini dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, sekaligus responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik pelayanan perizinan serta penanaman modal di Kabupaten Bekasi.

Kesesuaian capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi dengan kementerian dan perangkat daerah terkait, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan perizinan, percepatan proses perizinan berusaha, serta fasilitasi penanaman modal, diharapkan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berjenjang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap menyesuaikan target kinerja dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, sumber daya yang tersedia, tingkat pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, serta dinamika investasi yang berkembang di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan penanaman modal yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi eksisting Kabupaten Bekasi.

3.1.2 Provinsi

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang memiliki kewenangan di tingkat pusat, serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Sinkronisasi tersebut bertujuan agar capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi dapat memberikan kontribusi secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Kesesuaian antara capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi dengan kementerian terkait, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, diharapkan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara selaras di tingkat pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan target kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal agar sejalan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kementerian terkait, guna mendorong peningkatan iklim investasi serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.

3.1.3 Telaah Keterkaitan Kebijakan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Bagian ini menguraikan telaah keterkaitan dan keselarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Telaah dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Bekasi selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten dapat memberikan kontribusi yang berjenjang dan mendukung pencapaian target pembangunan secara nasional dan regional.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029). Tahap Pertama merupakan Tahap Penguatan Pondasi Transformasi modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi secara umum berdasarkan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, akselerasi pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. **Penguatan ekonomi unggulan daerah, Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja yang Kompeten;**
3. Peningkatan Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas;
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat;
5. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Penyediaan dan peningkatan cakupan layanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan

daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Untuk itu Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bekasi sebagai rencana tindakan komprehensif dan langkah/upaya untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Periode 2025-2029 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
1	T1 : Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing		
1.1	S1 : Meningkatnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata		1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan; 2. Meningkatkan pembangunan Literasi dan Kegemaran membaca Masyarakat
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Mempercepat implementasi wajib belajar 13 tahun
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy	1. Mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy
			2. Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Mempercepat pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.	Mempercepat penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.
		Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Mempercepat pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
1.2	S2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Meningkatkan upaya penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima
		peningkatan pelayanan kasus ATM (AIDS, Tuberkolosis, Malaria)	Meningkatkan pelayanan kasus ATM (AIDS, Tuberkolosis, Malaria)
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		Penyediaan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan layanan	Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan layanan
1.3	S3 : Meningkatnya taraf Hidup Masyarakat		1. Mengotimalkan Cakupan layanan PPKS; 2. Meningkatkan Kesempatan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja
		Penataan dan Pemenuhan sistem jaminan sosial, Perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Pengelolaan data kemiskinan agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Mempercepat Penataan dan Pemenuhan sistem jaminan sosial, Perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
		Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga
		Penyiapan, pemetaan peningkatan kualitas angkatan kerja baik melalui upskilling maupun reskilling.	Mempercepat penyiapan dan pemetaan peningkatan kualitas angkatan kerja baik melalui upskilling maupun reskilling.
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan			
2	T2 : Terwujudnya Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan		

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
2.1	S4 : Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		1. Meningkatkan nilai tambah perdagangan 2. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian; 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor perikanan; 4. Meningkatkan ketahanan pangan Daerah
		Penguatan sistem perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen Penguatan pengendalian inflasi daerah	Menguatkan sistem perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Menguatkan pengendalian inflasi daerah
		Pemetaan dan penataan potensi sektor ekonomi unggulan	Mengembangkan pemetaan dan penataan potensi sektor ekonomi unggulan
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	Melakukan pengelolaan susut dan sisa pangan
		Penguatan iklim investasi dan berusaha	Menguatkan iklim investasi dan berusaha
		Penataan BUMD secara terpadu	Meningkatkan upaya penataan BUMD secara terpadu
		Deregulasi, Penyederhanaan proses perizinan, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Melakukan Deregulasi dan Penyederhanaan Perizinan berusaha
		Perwujudan sistem kerja sama daerah dengan daerah lain, dan daerah dengan pihak ke 3 dalam mendukung pembangunan daerah.	Mempercepat perwujudan sistem kerja sama daerah untuk mendukung pembangunan daerah.
		Penerapan kerja sama luar negeri dalam mendukung pembangunan daerah	Mempercepat penerapan kerja sama luar negeri dalam mendukung pembangunan daerah
		Pengembangan ekosistem Riset dan Pengembangan (R&D) serta inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	Mendukung pengembangan ekosistem Riset dan Pengembangan (R&D) serta inovasi IPTEK di daerah
		Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Mengendalikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Pengembangan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengembangkan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
		Penataan kelembagaan dan keuangan koperasi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	Melakukan penataan kelembagaan dan keuangan koperasi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.
		Penataan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau melalui penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment)	Meningkatkan upaya penataan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
2.2	S5 : Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah		1. Meningkatkan daya saing industri; 2. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif 3. Meningkatkan daya saing UMKM; 4. Meningkatkan Kualitas Koperasi; 5. Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk IKM	Meningkatkan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk IKM
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
		Pengembangan industri manufaktur dan kemaritiman	Mengembangkan industri manufaktur dan kemaritiman

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif	Melakukan Penataan dan penguatan daya tarik wisata daerah
		Penguatan proses bisnis UMK melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Menguatkan proses bisnis UMK melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		Pengembangan kewirausahaan melalui Peningkatan mutu, kompetensi tenaga kerja, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.	Mengembangkan kewirausahaan melalui Peningkatan mutu, kompetensi tenaga kerja, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.
		Peningkatan produksi bibit dan varietas unggul komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar domestik	Meningkatkan produksi bibit dan varietas unggul komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar domestik
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Menyediakan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Optimalisasi penyediaan infrastruktur untuk upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur untuk upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kolaboratif			
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif		
3.1	S6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas		1. Mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berdaya saing 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
			3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; 4. Meningkatkan kualitas persandian dan keamanan informasi; 5. Meningkatkan tata kelola arsip; 6. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan (Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kualitas Produk Hukum dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa); 8. Meningkatkan peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah; 9. Meningkatkan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif yang harmonis dan Kolaboratif; 10. Meningkatkan Pelayanan Statistik yang Akurat; 11. Meningkatkan kinerja sumber pendapatan asli daerah; 12. Meningkatkan kualitas digitalisasi komunikasi publik
		Penataan kelembagaan dan kebijakan berdasarkan riset dan inovasi daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Melakukan penataan kelembagaan dan kebijakan berdasarkan riset dan inovasi daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Meningkatkan kualitas regulasi di daerah.
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Mengembangkan karir ASN daerah berbasis meritokrasi termasuk memperbaiki kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.	Meningkatkan upaya penguatan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.
3.2	S7 : Meningkatnya pelayanan publik yang kolaboratif dan terintegrasi		1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Meningkatkan pelayanan publik yang kolaboratif dan terintegrasi; 3. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan;
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	Melakukan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.
		Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Melakukan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		Penguatan regulasi rencana pengembangan daerah/ wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan)	Menguatkan regulasi rencana pengembangan daerah/wilayah
		Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas,	Menyediakan dan melakukan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan- lahan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas,
		Penguatan regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit dengan pola kerja sama	Menguatkan regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit dengan pola kerja sama
		Misi 4 : Mewujudkan Ketahanan Keluarga, sosial dan budaya yang inklusif melalui penguatan Nilai-Nilai Lokal Masyarakat dan Integrasi Sosial yang harmonis	

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
4	Terwujudnya ketahanan keluarga, sosial, perlindungan anak dan pembangunan pemuda yang inklusif		
4.1	S8 : Meningkatnya kualitas keluarga, ketahanan sosial dan kesetaraan gender		1. Mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk; 2. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan 3. Meningkatkan Pembangunan Gender dan Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Peningkatan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Meningkatkan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Penguatan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera	Meningkatkan upaya penguatan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera
			Mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk
5	Terwujudnya masyarakat yang agamis, harmonis dan berbudaya lokal maju		
5.1	S9 : Terwujudnya masyarakat yang tertib, harmonis dan berbudaya lokal maju		1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada; 2. Meningkatkan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Kebebasan Beragama dan Demokrasi; 3. Meningkatkan pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Lokal
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat
		Peningkatan kerukunan umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan
		Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui penegakan PERDA/PERKADA	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui penegakan PERDA/PERKADA
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	Menguatkan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Perlindungan cagar budaya, kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	Meningkatkan perlindungan cagar budaya, kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.
Misi 5 : Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan			
6	Terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		
6.1	S10 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana		1. Meningkatkan Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten; 2. Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau 3. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air 4. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana; 5. Mewujudkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang; 6. Meningkatkan penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan
		peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi dan perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
		Optimalisasi infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low- carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Mengoptimalkan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Kerjasama Pembangunan dan perluasan sistem transportasi massal dan transportasi barang	Meningkatkan kerjasama Pembangunan dan perluasan sistem transportasi massal dan transportasi barang
		Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek	Mendukung persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan	Menyediakan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan
		pengembangan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku dan penanganan banjir	Mengembangkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku dan penanganan banjir
		kerjasama penggunaan/pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kerjasama penggunaan/pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur
		pengembangan transportasi massal, transportasi perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan dan terintegrasi melalui pola kerjasama	Mengembangkan transportasi massal, transportasi perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan dan terintegrasi melalui pola kerjasama
		Penyiapan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Menyiapkan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Sektor Perhubungan
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Meningkatkan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Meningkatkan pengelolaan risiko bencana

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Peningkatan pelayanan sistem irigasi	Meningkatkan pelayanan sistem irigasi
		Perencanaan dan Penyiapan Infrastruktur yang ramah lingkungan	Mengembangkan Infrastruktur yang ramah lingkungan
		Penyiapan sarana dan prasarana Ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan	Menyiapkan sarana dan prasarana Ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan
		Penguatan regulasi dan penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Menyediakan regulasi dan menerapkan standar keandalan bangunan air (bendungan, waduk, Jaringan Irigasi, Drainase dan Saluran Sungai) yang berketahanan bencana dan iklim.
		Perencanaan dan Penyiapan Infrastruktur yang berkesinambungan	Merencanakan dan menyiapkan Infrastruktur yang berkesinambungan
6.2	S 11: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		1. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan; 2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah terpadu;
		Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, wilayah pesisir dan laut, tanah, air dan udara	Meningkatkan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, wilayah pesisir dan laut, tanah, air dan udara
		Penyiapan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Menyiapkan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
		Peningkatan cakupan layanan persampahan, Pengolahan sampah di hulu dan hilir berbasis teknologi, pengembangan pola kerja sama dalam pengolahan sampah serta Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan cakupan layanan persampahan, Pengolahan sampah di hulu dan hilir berbasis teknologi, pengembangan pola kerja sama dalam pengolahan sampah serta Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah
		Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah.	Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
6.3	S12 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Penyelenggaraan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim pada wilayah perkotaan, perdesaan dan pesisir berbasis sistem informasi geospasial	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan tata ruang
		Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu	Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau serta hunian yang berimbang di kawasan perkotaan	1. Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum; 2. Meningkatkan tatakelola pertanahan yang tertib; 3. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan perumahan; 4. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman; 5. Meningkatnya Akses Sanitasi Aman Daerah
			Memberikan dukungan fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau Memberikan dukungan implementasi hunian yang berimbang di kawasan perkotaan
		Pengembangan dan Penataan Prasarana sarana Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	Mengembangkan Prasarana sarana Utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
		percepatan serah terima prasarana sarana utilitas perumahan dan pemanfaatan lahan TPU sesuai lokasi penetapan	Mendorong percepatan serah terima PSU perumahan dan pemanfaatan lahan TPU
		Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Meningkatkan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah untuk mendukung proyek pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Peningkatan cakupan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	Memberikan dukungan fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal di kawasan perkotaan.	1. Memberikan dukungan fasilitasi penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau; 2. Menata Kawasan Permukiman Kumuh
		peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman
		pengembangan dan Peningkatan akses infrastruktur air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Mengembangkan dan meningkatkan akses infrastruktur air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan
		Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		Penyediaan dan pemerataan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya pada kawasan-kawasan strategis	Meningkatkan pemerataan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya pada kawasan-kawasan strategis
		Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria	Mengembangkan perencanaan dan implementasi Reforma Agraria
		Penguatan regulasi dan penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Menguatkan regulasi dan menerapkan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
6.4	S13 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan		Meningkatkan desa mandiri
		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa.	Meningkatkan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa.
		Penyiapan kawasan strategis pertanian	Menyiapkan kawasan strategis pertanian

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	Mengembangkan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital.	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital.

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Arah Kebijakan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan arah kebijakan RPJMD yang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Strategi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Penguatan iklim investasi dan berusaha	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan Berbasis Elektronik dan Terintegrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan Berbasis Elektronik dan Terintegrasi
			Pengembangan inovasi pelayanan publik	Mengembangkan inovasi pelayanan publik
			Penguatan Promosi Investasi Berbasis Potensi Wilayah	Menguatkan Promosi Investasi Berbasis Potensi Wilayah
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana prasarana serta Kelembagaan Penanaman Modal	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sarana prasarana serta Kelembagaan Penanaman Modal
			Penguatan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Menguatkan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Investasi
		Deregulasi, Penyederhanaan proses perizinan, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi di sektor ekonomi produktif, biru, hijau, dan EBT	Menguatkan Harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi di sektor ekonomi produktif, biru, hijau, dan EBT
			Penyederhanaan proses perizinan dan non-perizinan untuk sektor pertanian, perikanan, dan industri ramah lingkungan	Akselerasi Penyederhanaan dan Standardisasi Proses Perizinan dan Non-Perizinan untuk Sektor Pertanian, Perikanan, dan Industri Ramah Lingkungan
			Prioritisasi layanan perizinan untuk UMKM dan koperasi di sektor ekonomi produktif	Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan Perizinan Sektor Strategis untuk UMKM dan koperasi di sektor ekonomi produktif
			Fasilitasi dan kemudahan perizinan investasi pada energi baru-terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Perizinan untuk Investasi Hijau, Biru, dan EBT

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Didalam merumuskan pentahapan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

Setelah melihat uraian tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2026 dan renstra DPMPTSP, maka pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang dimulai pada Tahun 2026 dengan tema pembangunan berfokus kepada Pemulihan dan Penguatan Iklim Investasi Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi Lokal melalui Digitalisasi Layanan dan Penyederhanaan Regulasi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Maju dan Inklusif. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemulihan dan Penguatan Iklim Investasi Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi Lokal melalui Digitalisasi Layanan dan Penyederhanaan Regulasi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Maju dan Inklusif	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah melalui Sektor Strategis dan Ramah Lingkungan	Penguatan Kemitraan Investasi dan Inovasi Pelayanan Menuju Kabupaten Bekasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi Investasi Produktif dan Transformasi Layanan Menuju Bekasi yang Bangkit, Maju dan Sejahtera	Evaluasi dan Penguatan Keberlanjutan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Adapun rincian masing-masing tahap pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut :

➡ **Tahun 2026 : Pemulihan dan Penguatan Iklim Investasi Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi Lokal melalui Digitalisasi Layanan dan Penyederhanaan Regulasi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Maju dan Inklusif**

- Harmonisasi regulasi dan simplifikasi perizinan
- Pemulihan kepercayaan investor terutama pasca Covid-19
- Penguatan kelembagaan PTSP dan layanan dasar

- Modernisasi sistem OSS dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
- Layanan digital berbasis data sektoral
- Peningkatan kualitas SDM pelayanan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Bekasi Nomor 4 tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan didukung oleh aparatur yang profesional dan berkualitas, DPMPTSP Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi perangkat daerah yang andal dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, disusun program dan kegiatan sebagai langkah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan dimaksud disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kabupaten Bekasi mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 3. 4 Rancangan Awal DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		

Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3. 5 Rancangan Awal Program dan Kegiatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	75,81
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-
2	1	0	2.0	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket
2	1	0	2.0	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
2	1	0	2.0	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	103 Orang
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-
2	1	0	2.0	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket
2	1	0	2.0	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan
2	1	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-
2	1	0	2.0	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
2	1	0	2.0	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-
2	1	0	2.0	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2	1	0	2.0	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54 Laporan

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Realisasi Total terhadap target Investasi	1%
2	1	0	2.0		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-
2	1	0	2.0	000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
2	1	0	2.0	000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen
2	1	0	2.0		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		-	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1 8	0 2	2.0 2	000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	1 8	0 2	2.0 2	000 3	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah
2	1 8	0 2	2.0 2	000 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	1 8	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	9,00%
2	1 8	0 3	2.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-
2	1 8	0 3	2.0 1	000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1	0	2.0	000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen
2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	100%
2	1	0	2.0		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		-	-
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1 8	0 4	2.0 1	000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha
2	1 8	0 4	2.0 1	000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	400 Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha.

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	-
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	85%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	1 8	0 6	2.0 1	000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat uraian mengenai perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sebagai penjabaran operasional dari kebijakan, tujuan, dan sasaran perangkat daerah. Bab ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DPMPTSP dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan arah pembangunan daerah, kebutuhan pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta kemampuan pendanaan daerah.

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja sasaran, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta masukan dari pemangku kepentingan. Selain itu, perumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, kebijakan nasional dan provinsi, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPD dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Bab ini juga menyajikan rekapitulasi jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi, sebagai gambaran keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rekapitulasi tersebut dilengkapi dengan sebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat maupun kegiatan pendukung internal perangkat daerah, sehingga dapat menunjukkan jangkauan dan fokus pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya, Bab IV memuat tabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan yang merinci indikator kinerja, target capaian, lokasi, pagu indikatif, serta sumber pendanaan. Tabel ini menjadi alat kendali dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4. 1 Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	-	-			-							-	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudk a n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bula n		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudk a n Masyaraka t dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				103 Orang		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudk a n Masyaraka t dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudk a n Masyaraka t dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				36 Paket		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudk a n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.01.2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				54 Laporan		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-							-	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-				-	Mewujudk a n Masyaraka t dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	0,00
	2.18.02.2.01.000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudk a n Masyaraka t dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00
	2.18.02.2.01.000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemb a ngkan Ekonomi Kerakyata n dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkunga n yang Tidak Eksplaitatif	-		0,00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-				-	Mengemb a ngkan Ekonomi Kerakyata n dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkunga n yang Tidak Eksplaitatif	Meningkatny a Realisasi Investasi	-	0,00
	2.18.02.2.02.000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemb a ngkan Ekonomi Kerakyata n dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkunga n yang Tidak Eksplaitatif	Meningkatny a Realisasi Investasi		0,00
	2.18.02.2.02.000 3	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan , Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Realisasi Investasi		0,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	-	Meningkatnya Realisasi Investasi		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-							-	0,00
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere	-	Meningkatny a Realisasi Investasi	-	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.03.2.01.000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Realisasi Investasi		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	-	Meningkatnya Realisasi Investasi		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-							-	0,00
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-				-	Mengemb a ngkan Ekonomi Kerakyata n dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkunga n yang Tidak Eksploitatif	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											yandang disabilitas.				
	2.18.04.2.01.000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemb a ngkan Ekonomi Kerakyata n dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkunga n yang Tidak Eksplotatif	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
	2.18.04.2.01.000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				400 Kegiatan Usaha		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-							-	0,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	-	Meningkatnya Realisasi Investasi	-	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.05.2.01.000 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				40 Kegiatan Usaha.		-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Realisasi Investasi		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	-	Meningkatnya Realisasi Investasi		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			-				-		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda	-	Meningkatny a Realisasi Investasi		0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-							-	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-				Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	-	0,00
	2.18.06.2.01.000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
											NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen		Kab. Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		0,00

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya didasarkan pada usulan dari bidang-bidang dan bagian di lingkungan DPMPTSP. Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tercantum dalam Renja DPMPTSP merupakan indikasi yang hendak dicapai pada Tahun 2026 dan bersifat indikatif. Renja DPMPTSP Tahun 2026 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, Renstra DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 dan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Keputusan Kepala DPMPTSP Tentang Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPMPTSP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-DPMPTSP) sebagai bahan awal penyusunan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 dan menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.

Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- **Penyelarasan Indikator Kinerja:** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang spesifik, terukur, dan selaras dengan target RPJMD dan RPJPD.
- **Peningkatan Pengawasan:** Memperkuat pengawasan internal terkait potensi benturan kepentingan, gratifikasi, serta memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- **Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor:** Mengadakan rapat koordinasi berkala dengan dinas teknis terkait (seperti Dinas PUPR atau Dinas Lingkungan Hidup) untuk mengatasi hambatan birokrasi dan lamanya waktu penerbitan izin.

Fokus pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Menjadikan IKM sebagai tolok ukur utama evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bersama ini juga dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penghargaan serta Inovasi yang pernah diperoleh selama kurun waktu Tahun 2025.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik serta program dan kegiatan DPMPTSP pada Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha;
- b. Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;
- c. Dalam upaya peningkatan tindak lanjut permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mewujudkan sasaran DPMPSTP Kabupaten Bekasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan public yang prima dan peningkatan realisasi investasi, diperlukan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan pelaku usaha
- b. Dalam menetapkan dokumen harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. Peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Kabupaten Bekasi, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



IMAN NUGRAHA, ST, M.Si

NIP. 19760829 200311 1 001